



Cornelis: BPKP Bukan Alat Penghancur

■ Lantik Arman Sahri Harahap

PONTIANAK, TRIBUN - Gubernur Kalbar Cornelis melantik Arman Sahri Harahap sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Jl A Ayani, Rabu (26/8).

"Saya minta setelah dilantik hari ini, Kepala BPKP segera berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait, termasuk Pemerintah Provinsi Kalbar," ujar Gubernur Kalbar kepada *Tribun*, Rabu (26/8).

Gubernur meminta Kepala BPKP Kalbar yang baru berkoordinasi dengan Wagub sebagai pengawasan dan pengendalian.

"Itu sudah diatur dalam undang-undang. Wagub kalau ada pegawai atau kadis nakal pecat *jak*, aku yang teken," kata Cornelis kepada Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya yang hadir dalam pelantikan.

Ia meminta BPK dan BPKP dapat bekerjasama dan saling mendukung, sehingga aparat pemerintahan tidak bingung dalam teknis pelaksanaannya.

"Kerja bagus-bagus sesuai UU. BPKP kita harapkan membimbing internal pemerintah supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi, terutama manajemen keuangan, pemerintahan dan pengadaan barang dan jasa," ungkapnya.

Ia menyatakan, BPKP bukan alat untuk menghancurkan pemerintah, tetapi untuk audit internal.



SUMPAH - Arman Sahri Harahap mengucapkan sumpah jabatan pada pelantikan dirinya menjadi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar oleh Gubernur Kalbar Cornelis di Balai Petitih, Rabu (26/8).

Di mana peran BPKP itu membimbing pemerintah supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi dalam

■ Bersambung ke Hal. 15

Cornelis: BPKP Bukan Alat

Sambungan Hal. 9

melaksanakan program pembangunan. "Jadi BPKP tidak ikut-ikutan memeriksa seperti lembaga hukum lainnya," tegas Cornelis.

Gubernur juga mengakui bahwa dirinya tidak pernah melaporkan atau mengadu ke pemerintah pusat terkait kinerja instansi vertikal yang bertugas di Provinsi Kalbar.

"Saya tidak pernah melaporkan kepala-kepala instansi vertikal yang bertugas di Kalbar. Aku ini pegawai negeri, lari ke dunia politik karena kebijakan tidak adil," terangnya.

Ia meminta jika ada hal-hal mendesak segera dikoordinasikan dengan Wagub. Kalau persoalan Tipikor, lanjutnya, segera diselesaikan.

Begitu juga jika terjadi kesalahan administrasi negara.

Cornelis menjelaskan, awalnya calon yang dilantik sebagai Kepala BPKP Kalbar yaitu Fajar. Namun, yang bersangkutan meninggal dunia beberapa waktu lalu sehingga BPKP pusat menunjuk Arman Sahri Harahap untuk memimpin lembaga ini.

Arman Sahri Harahap sebelumnya menjabat sebagai Ketua BPKP Sumatera Barat. Melalui SK Nomor 1-166/K/SU/2015 tertanggal 29 Juli 2015, ia dilantik sebagai Kepala BPKP Kalbar oleh Gubernur Kalbar.

Arman menuturkan, sebagai lembaga pengawasan, BPKP berupaya untuk mem-

bantu pemerintah daerah dalam menegakkan hukum akuntabilitas.

"Kita akan mencari solusi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, seperti yang diharapkan gubernur," ucapnya.

Arman mengatakan, BPKP bukan bagian dari *criminal justice sistem*, tetapi hanya membantu aparat penegak hukum di dalam menghitung kerugian negara dan syarat untuk mengatakan itu adalah adanya perbuatan pelanggaran hukum.

"Kita akan menjalankan tugas-tugas sebagai bagian dari pengawasan untuk tindak lanjut diserahkan kepada penegak hukum," jelasnya. (doi)



KKR Pertama Terapkan SAP Berbasis Akrual...

Untuk daerah Kalbar, yang pertama kali melakukan dan menggunakan SAP berbasis Akrual adalah Pemprov Kalbar, dan Kabupaten Kubu Raya. Saat ini Kubu Raya sudah menggunakan sistem SAP dalam penyusunan dan pelaporan penggunaan Anggaran Daerah dengan berbasis akrual.

Saat ini akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan sering menjadi problem bagi daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum mampu memberikan kepuasan atau keyakinan terhadap masyarakat. Sehingga

implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Penyusunan LKPD dan Implikasinya Terhadap Opini BPK.

"Untuk itu, saat ini di Kalimantan Barat, kita di Kubu Raya adalah Kabupaten/Kota pertama yang menerapkan SAP berbasis Akrual ini bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus kita akan menjadi Kabupaten percontohan nantinya dalam penerapan SAP berbasis akrual ini di Daerah Kalimantan Barat," ungkap wakil bupati Kubu Raya, Hermanus, kemarin.

Penerapan SAP berbasis

akrual, diharapkan menjadi motivasi meningkatkan transparansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mensukseskan program tersebut pemkab Kubu Raya akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas dalam mewujudkan SAP berbasis akrual yang lebih baik di Kubu Raya.

"Sebagai kabupaten pertama dan ditunjuk oleh BPK RI Kalimantan Barat, kita akan terus mengevaluasi kinerja dan SDM aparatur kita agar apa yang diharapkan dalam penerapan SAP berbasis

akrual ini baik dalam penyusunan maupun dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dapat semakin baik," ucapnya.

Sementara itu, wakil ketua DPRD Kubu Raya, Suprpto menyambut baik dan akan selalu mendukung program-program dalam upaya penerapan sistem akuntansi pemerintah yang transparan. Menurutnya hal tersebut akan memperkecil kemungkinan penyimpangan dan kelalaian dalam pengelolaan anggaran sekaligus akan dapat membantu penyerapan anggaran dengan cepat jika dilaksanakan dengan baik.